

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN  
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KPP PRATAMA PRABUMULIH**



**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KPP PRATAMA PRABUMULIH**

Jl. Jenderal Sudirman No.39 Cambai, Prabumulih 31141 Telepon (0713)  
3310300, 3313810; Faksimili (0713) 3313883

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan.

### **1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2020, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih berdiri pada tanggal 9 September 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ./2008 tanggal 4 September 2008. Sesuai Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Semula, Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih meliputi dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih. Namun berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang

kemudian disahkan tanggal 11 Januari 2013 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2013, Penukalan Abab Lematang Ilir (PALI) terbentuk sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim.

Dengan demikian, Wilayah Kerja KPP Pratama Prabumulih meliputi tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, dan Kabupaten PALI.

#### 1. Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 748.306 Ha yang terbagi dalam 22 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 235 kelurahan/desa. Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Muara Enim terletak di Muara Enim.

#### 2. Kota Prabumulih

Kota Prabumulih adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 43.446 Ha yang terbagi dalam 6 kecamatan dan 35 desa/kelurahan. Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Prabumulih terletak di Cambai.

#### 3. Kabupaten PALI

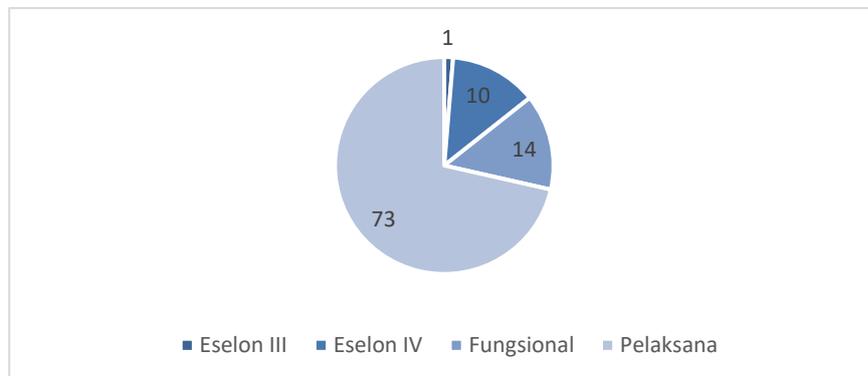
Kabupaten PALI adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 184.000 Ha yang terbagi dalam 5 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 57 kelurahan/desa. Pusat Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pali terletak di Talang Ubi.

Struktur Organisasi KPP Pratama Prabumulih berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

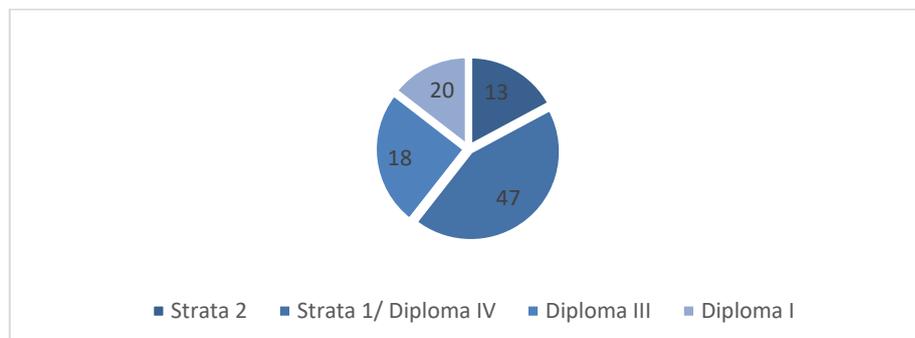


Sumber daya manusia KPP Pratama Prabumulih untuk tahun 2024 adalah sebanyak 98 orang yang terdiri dari pegawai beserta para dengan rincian sebagai berikut:

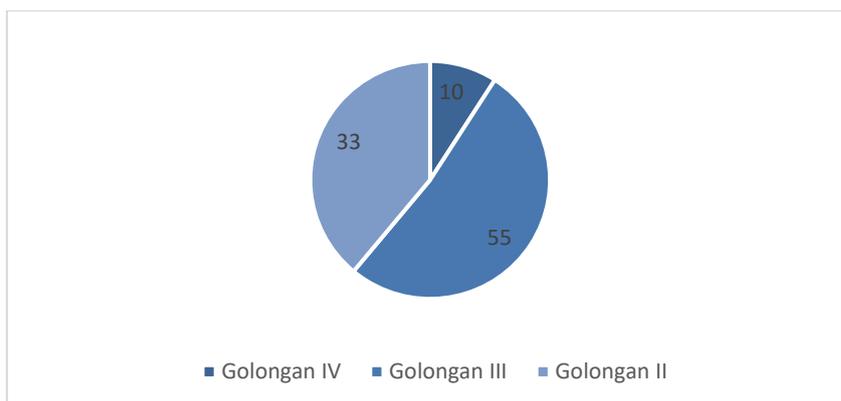
1. Jumlah pegawai berdasarkan formasi:



2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan :



3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat :



### 1.3 SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), sebagai berikut:

- BAB I           PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  - 1.3 Sistematika Laporan
- BAB II          PERENCANAAN KINERJA
  - 2.1 Perencanaan Strategis
  - 2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- BAB III         AKUNTABILITAS KINERJA
  - 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
  - 3.2 Realisasi Anggaran
- BAB IV         PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan Kinerja KPP Pratama Prabumulih dilandasi dengan rencana strategis melalui pernyataan Visi: “Menjadi Institusi Pemerintah Penghimpun Pajak Negara Terbaik di Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung” dan pernyataan Misi: “memberikan pelayanan berkualitas secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas dalam menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

#### **2.2 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-*One* dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Untuk Periode Kinerja 2024, Rencana Kerja KPP Pratama Prabumulih ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Nomor PK-11A/WPJ.03/2024 dengan penjabaran Sasaran Strategis sebagai berikut:

##### **1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal**

Indikator kinerja utama penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal terdiri dari Persentase realisasi penerimaan pajak dan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Adapun rencana penerimaan pajak yang ditetapkan untuk KPP Pratama Prabumulih sebesar 2,718,543,960,000 dan rencana Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 100.

## **2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi**

Indikator kinerja utama kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi terdiri dari Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai apabila sebanyak 36.463 Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan. Rencana penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ditetapkan sebesar Rp 2.564.370.413.000.

## **3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

Indikator kinerja utama kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi terdiri dari persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM). Persentase penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) yang ditetapkan sebesar Rp154.173.547.000.

## **4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif**

Indikator kinerja utama edukasi dan pelayanan yang efektif adalah Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditetapkan sebesar 74% dan target indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan ditetapkan sebesar 100%.

## **5. Pengawasan pembayaran masa**

Indikator kinerja utama pengawasan pembayaran masa yang efektif diukur berdasarkan Persentase pengawasan pembayaran masa dan target yang ditetapkan adalah sebesar 90%.

## **6. Pengujian kepatuhan material yang efektif**

Indikator kinerja utama pengawasan kepatuhan material yang efektif terdiri dari Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Adapun

target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 100% dan target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 100%.

#### **7. Penegakan hukum yang efektif**

Indikator kinerja utama penegakan hukum yang efektif terdiri dari Tingkat efektivitas pemeriksaan, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan. Adapun target Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 100%, target Tingkat Efektivitas Penagihan ditetapkan sebesar 75%, dan target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ditetapkan sebesar 100%.

#### **8. Data dan Informasi yang berkualitas**

Indikator kinerja utama data dan Informasi yang berkualitas terdiri dari Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dengan target yang ditetapkan sebesar 55%.

#### **9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Indikator kinerja utama Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ditetapkan persentase sebesar 100%, Target Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 85%, dan Target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 90%.

#### **10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Indikator kinerja utama 1. Pengelolaan keuangan yang akuntabel yaitu Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dengan target yang telah ditetapkan sebesar 91%.

**Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih**  
**Nomor : PK-11A/WPJ.03/2024**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	93,11
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							93,11
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,33%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,33
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	83,22	Max	P/L	19,00%	42,22%	83,22
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,58
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,32%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,32
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	121,29%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,53
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,53%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,53
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,69
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,72
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	113,43%	Max	E/M	21,00%	50,00%	113,43
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,68
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,92%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,92
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,14%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,14
7	Penegakan hukum yang efektif							111,18
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,29%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,29
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	87,29%	Max	P/L	19,00%	36,54%	116,39
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,32%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	115,88
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,75
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,82	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,82
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,17	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,44
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	97,34	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								106,99

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Prabumulih telah mencapai realisasi melebihi target yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi 106,99. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Prabumulih tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023 yaitu sebesar 112,14 dan tahun 2024 yaitu sebesar 114,24.

Keberhasilan KPP Pratama Prabumulih dalam mencapai Nilai Kinerja Organisasi melebihi target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan semua pihak yang mendukung. Dengan jumlah pegawai per Desember 2024 sebanyak 98 orang, KPP Pratama Prabumulih telah berupaya untuk mendayagunakan kemampuan Sumber Daya yang ada secara efektif dan efisien.

## 1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

### a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Persentase realisasi penerimaan pajak	DJP	%	KPP Pratama Prabumulih	%
Target	Rp 1,921,943,100,000,000	100,00	Rp2,718,543,960,000	100,00
Realisasi	Rp 1,930,811,632,251,832	100.46	Rp2,727,516,169,916	100.33

Kinerja diukur sesuai dengan menghitung perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 sejumlah Rp2,727,516,169,916, melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,718,543,960,000 atau mencapai realisasi sebesar 100.33% tidak jauh dengan persentase capaian penerimaan pajak secara nasional yang mencapai angka 100,46%.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Prabumulih dalam mencapai target kinerja realisasi penerimaan pajak sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan penerimaan tahun berjalan, dengan menerbitkan teguran, menerbitkan STP, menggali potensi data tahun berjalan, serta melakukan upaya dinamisasi setoran PPh Pasal 25;
2. Melakukan analisis naik turun setoran pajak, terutama yang bernilai besar (> Rp 100 juta);
3. Menghimbau Wajib Pajak yang memiliki ketetapan PBB besar untuk melunasi sebelum tanggal jatuh tempo;

4. Melakukan visit, komunikasi, dan memberikan penjelasan kepada Satker pemilik pagu terbesar terkait kewajiban perpajakan;
5. Optimalisasi komite kepatuhan untuk mengidentifikasi data dan potensi bahan baku PKM;
6. Monitoring penyelesaian DPP Semester I dan II 2024 sesuai ketentuan dan batas waktu;
7. *Gameplan* dan pengawasan pemeriksaan;
8. Kegiatan bedah Wajib Pajak

**b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Prabumulih di tahun 2024 sebesar 83,22%.

Adapun beberapa akar masalah dalam capaian yang tidak memenuhi target adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pertumbuhan bruto sebesar 96.44% disebabkan adanya penurunan setoran beberapa jenis pajak, yaitu:
  - a. Pagu anggaran belanja pemerintah untuk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp497.089.133.975
  - b. Terdapat penurunan ketetapan PBB tahun 2024, terutama dari Minerba, sebesar 36,84% sejumlah Rp175.050.174.187 dibandingkan dengan tahun 2023
  - c. Terdapat penurunan setoran PPh Pasal 21, terutama dari PT Bukit Asam, karena insentif yang diterima di tahun 2025 adalah berdasarkan kinerja tahun 2024. Penurunan PPh Pasal 21 adalah sebesar 19,01% sejumlah Rp51.651.026.984
2. Capaian deviasi sebesar 70% disebabkan adanya pergeseran pembayaran PPM PBB Minerba yang akan diterima dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga sebagai potongan SPMKP. Penerimaan potongan SPMKP sebesar Rp256.735.153.057 direncanakan akan diterima pada bulan September tetapi dikompensasikan oleh KPP Wajib Pajak Besar Tiga pada bulan Agustus sehingga terjadi deviasi pada

bulan tersebut sebesar 140,71% yang berimplikasi pada periode berikutnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Prabumulih dalam mengatasi masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akurasi penyusunan prognosa bulanan, maka akan dioptimalkan pemanfaatan aplikasi DRM dan melakukan konfirmasi pembayaran yang akan dilakukan oleh WP melalui AR;
2. Koordinasi Pembayaran PBB Migas;
3. Melakukan pengamanan akurasi prognosa pembayaran PPM instansi pemerintah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan meminta konfirmasi ke AR tentang pembayaran atau penyetoran pajak yang akan dilakukan oleh WP;
4. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak PT Bukit Asam.

## **2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi**

### **a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Jumlah SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama 2023 adalah sebanyak 40.100 SPT dari target sebesar 36.463 sehingga persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai sebesar 121.29% dari target sebesar 100%. Kegiatan KPP Pratama Prabumulih dalam mencapai target kepatuhan SPT sebagai berikut :

1. Membentuk satgas pelaporan SPT Tahunan;
2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke wajib pajak (Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta);
3. Melakukan LDK ke kecamatan, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta;
4. Menerbitkan surat teguran;
5. Membuat peraturan SPT menjadi syarat pelayanan publik dan layanan administrasi kepegawaian ASN;
6. Membuat dan menggunakan aplikasi monitoring dan validasi SPT Tahunan;

7. Menghubungi WP melalui telepon, email blast dan Whatsapp blast untuk melaporkan SPT Tahunan;
8. Melakukan Pengecekan Pelaporan SPT Tahunan bagi WP yang mengajukan permohonan melalui TPT dan Helpdesk.

**b. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

Jumlah Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2023 sebesar Rp2.634.311.629.653 dari target yang ditentukan sebesar Rp2.564.370.413.000 sehingga persentase penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 102,73%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM), antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sesuai ND-723/PJ.06/2024;
  - a. Collecting Data, berupa data internal maupun data eksternal;
  - b. Mapping Wajib Pajak;
  - c. Penelitian Kepatuhan Formal dan Material;
  - d. Komunikasi dengan Wajib Pajak sebelum jatuh tempo;
  - e. Klarifikasi, berupa permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
  - f. Penerbitan STP; dan
  - g. Pemeriksaan Data Konkret atau penerbitan Surat Teguran.
2. Mengirimkan Surat Permintaan Perkiraan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 ke 10 Wajib Pajak dengan kontribusi terbesar KPP;
3. Pembuatan Laporan Pengamatan sebanyak 4 buah Laporan;
4. Identifikasi rencana pembayaran PBB di atas 5M telah dilakukan dan seluruhnya sudah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak.

### **3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

Capaian penerimaan pajak KPP Pratama Prabumulih dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM) sebesar Rp93.204.701.807 dari target yang ditentukan sebesar Rp154.173.547.000 atau sebesar 60.45%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material (PKM), antara lain :

1. Optimalisasi komite kepatuhan untuk mengidentifikasi bahan baku PKM;
2. Monitoring penyelesaian DPP Semester I dan II 2024;
3. Gameplan dan pengawasan pemeriksaan;
4. Kegiatan bedah Wajib Pajak dan santiran hasil pemeriksaan;
5. Pengumpulan dan identifikasi data potensi pajak;
6. Pembuatan Laporan Pengamatan sebanyak 4 buah Laporan.

### **4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif**

#### **a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Selama tahun 2024 KPP Pratama Prabumulih telah melakukan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak berupa kelas pajak *online*, *Tax Goes To School*, maupun kegiatan penyuluhan lainnya. Hal ini menjadikan KPP Pratama Prabumulih memiliki capaian efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 88,80%, dimana target yang telah ditentukan yaitu 74%.

#### **b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan**

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Prabumulih berhasil mencapai indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 113,43 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.

### **5. Persentase Pengawasan pembayaran masa**

Realisasi kinerja pengawasan pembayaran masa Tahun 2024 adalah 120% dari total target 90%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja pengawasan pembayaran masa antara lain :

- Menerbitkan STP atas dafnom yang telah ditentukan;
- Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan yang ada di Approweb;
- Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar;
- Melakukan analisis dan monitoring terhadap WP yang terdapat angsuran PPh Pasal 25 namun tidak/kurang melakukan pembayaran.

## **6. Pengujian kepatuhan material yang efektif**

### **a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

Realisasi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024 sebesar 120%, dengan capaian presentase strategis dan presentase kewilayahan sebesar 120%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain :

- Monitoring dan pengawasan atas tindak lanjut data (data pemicu/data penguji/LHA/data lainnya) dalam rangka penerbitan SP2DK yang berkualitas;
- Monitoring dan pengawasan atas tindak lanjut penerbitan SP2DK;
- Melakukan kegiatan konseling dan visit untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan;

### **b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai sebesar 119,92% dengan rincian :

- Realisasi DSTP sebesar 120%; dan
- Realisasi Pemanfaatan Data Matching sebesar 120%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain :

- Optmalisasi komite kepatuhan untuk mengidentifikasi bahan baku PKM;
- Monitoring penyelesaian DPP Semester I dan II 2024;
- Gameplan dan pengawasan pemeriksaan;
- Kegiatan bedah Wajib Pajak dan santiran hasil pemeriksaan;
- Pengumpulan dan identifikasi data potensi pajak.

### **c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 113,14% dari target sebesar 100%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak telah dilaksanakan tepat waktu;
2. Telah dilakukan penyusunan KKA atas SPT Rugi Tidak Lebih Bayar dan KKA atas Pengembalian Pendahuluan (post audit);
3. Pembuatan KKA untuk Pemeriksaan PBB.

## **7. Penegakan hukum yang efektif**

### **a. Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

Realisasi efektivitas pemeriksaan KPP Pratama Prabumulih tercapai sebesar 119,29% dari target sebesar 100%, dengan rincian:

- Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP sebesar 120%%;
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan sebesar 114,06%;
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan sebesar 100,84%;
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu sebesar 120%;

- Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi sebesar 120%;
- Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian sebesar 118,22%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja efektivitas pemeriksaan, antara lain :

- Pengawasan melalui Dashboard pemeriksaan;
- Melakukan gelar perkara konsep pemeriksaan pra SPHP;
- Pembentukan Klasmen penyelesaian pemeriksaan dan monev setiap bulan.

#### **b. Tingkat Efektivitas Penagihan**

Realisasi efektivitas penagihan tercapai sebesar 87.29% dari target 75% dengan rincian sebagai berikut,

- Realisasi variable Tindakan penagihan sebesar 60%;
- Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC sebesar 16,40%;
- Pencairan Wajib Pajak DSPC sebesar 10,89%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target kinerja efektivitas penagihan, antara lain :

- Memanfaatkan Ms Planner dalam melakukan jadwal tindakan penagihan;
- Fokus tindakan penagihan dilakukan atas Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus pada tahun 2020-2023 dan masuk DSPC.

#### **c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tercapai sebesar 100% dengan rincian terdapat 1 usulan pemeriksaan yang disetujui.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan, antara lain :

- Pembentukan tandem FPP dan AR dalam melakukan analisa untuk usulan pemeriksaan pajak;

- Mempersiapkan bahan baku sejak awal tahun bersamaan dengan DSPP

## **8. Data dan Informasi yang berkualitas**

### **a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tercapai sebesar 115% dengan rincian :

- Realisasi penyelesaian laporan pengamatan tercapai sebesar 100% dengan rincian telah diselesaikan 4 laporan dari total target 4 laporan;
- Realisasi penyediaan data potensi perpajakan sebesar 150,76% dengan rincian telah diselesaikan 2.171 data secara tepat waktu dari total target 1.440 data.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, antara lain :

- Melakukan penyisiran ke tempat sentra ekonomi;
- Berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait potensi warganya yang melakukan kegiatan kegiatan usaha.

### **b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

Realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP tercapai sebesar 83% dari total target 55%, dengan rincian sebagai berikut,

- Realisasi Data Utama sebesar 59%, yaitu terdapat 25 data utama yang dikirim dari target 35 data utama.
- Realisasi Data Lainnya sebesar 24%, yaitu terdapat 36 data lainnya yang dikirim dari target 46 data lainnya.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam upaya mencapai target penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

- Melakukan visit terhadap setiap Pemerintah Daerah untuk menyampaikan surat permintaan data dan melakukan koordinasi dengan PIC data ILAP di Pemerintah Daerah;
- Melakukan pembinaan dan pendampingan pengisian data ILAP serta dilakukan revidi atas data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke KPP sebelum dikirim ke Kanwil;
- Melakukan reminder kepada PIC data ILAP di Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan data secara berkala;
- Melakukan koordinasi dengan PIC Kanwil untuk memastikan data yang akan dikirim sudah benar dan sesuai ketentuan agar data dapat dianggap lengkap oleh DIP.

## **9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

### **a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 116,82% dari target 100%. Hal ini dapat dicapai dengan menindaklanjuti hasil analisis pegawai berdasarkan kategori risiko tertentu.

### **b. Indeks Penilaian Integritas Unit**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 92,17% dari target sebesar 85%. Adapun langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Prabumulih dalam mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Tugas;
- Penggunaan Map Anti gratifikasi saat kunjungan ke Wajib Pajak;
- Laporan Pemanfaatan Jam Kerja Pegawai

### **c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 99,03% dari target 90%. Target ini dapat dicapai dengan melakukan Monitoring pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko.

## 10. Pengelolaan Kinerja yang akuntabel

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 98,925% dengan realiasi IKPA sebesar 97,85 dan nilai SMART sebesar 100.

Target ini bisa dicapai oleh KPP Pratama Prabumulih dengan cara melakukan simulasi IKPA setiap bulan;

## 3.2 REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan realisasinya, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi belanja neto KPP Pratama Prabumulih pada Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga dan pengembalian belanja adalah sebesar Rp6.394.961.309, atau 91% dari pagu belanja dalam DIPA yaitu sebesar Rp7.008.991.000, Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp334.479.488 atau 6% dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp6.060.481.821.

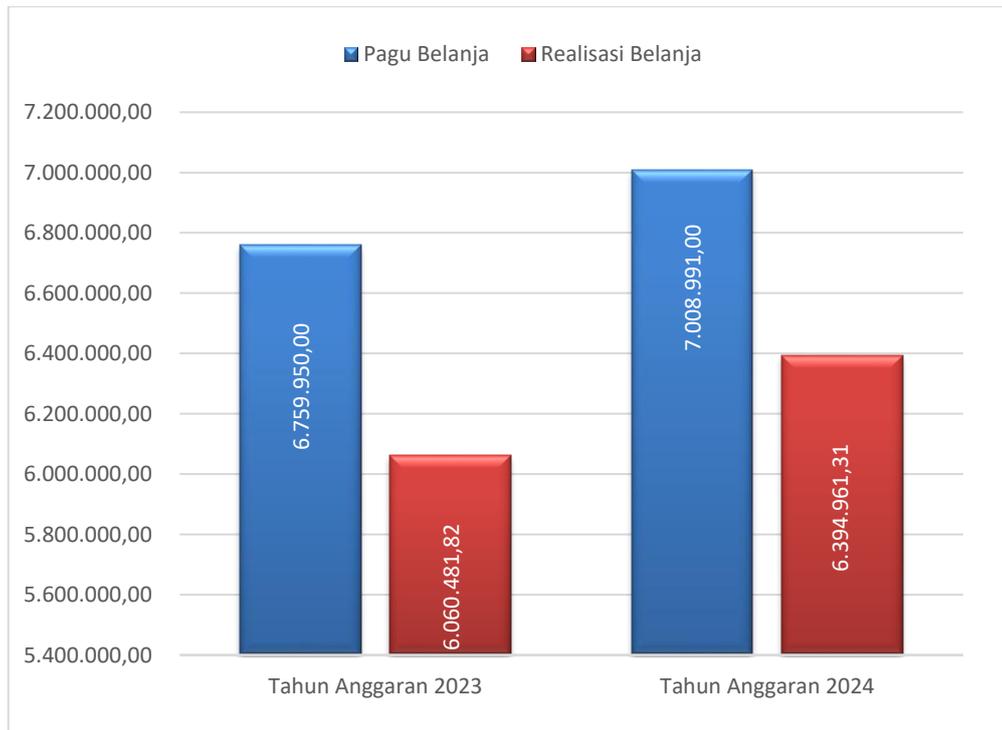
Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja KPP Pratama Prabumulih meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja KPP Pratama Prabumulih

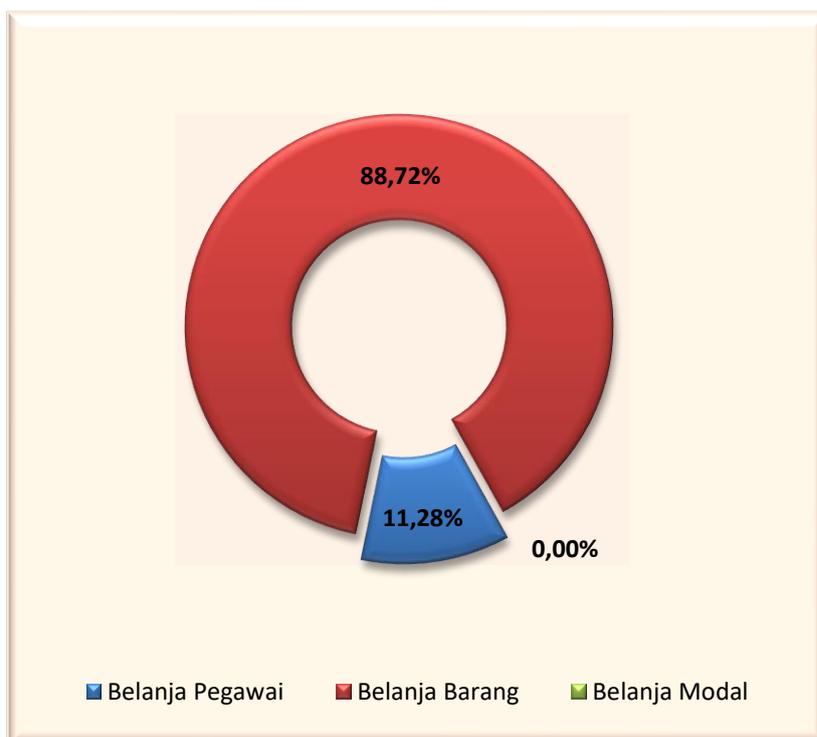
diklasifikasikan berdasarkan unit kantor wilayah, fungsi, jenis belanja dan jenis satuan kerja.

Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagaimana Grafik 1.1 dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik 1.2 berikut:

**Grafik 1.1**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2024**



**Grafik 1.2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja yang berakhir 31 Desember 2024**



Belanja KPP Pratama Prabumulih dibagi menurut jenis belanja terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel 1.3 berikut :

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja**  
**yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp875.690.000	Rp721.519.000	82	787.005.000	(65.486.000)	-8%
Belanja Barang	Rp 6.133.301.000	Rp5.673.442.309	93	5.204.392.821	469.049.488	9%
Belanja Modal	0	0	0	69.084.000	69.084.000	-100%
Realisasi Belanja Bruto	7.008.991.000	6.394.961.309	91	6,060,481,821	334.479.488	6%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0	0	0
Realisasi Belanja Neto	7.008.991.000	6.394.961.309	91	6,060,481,821	334.479.488	6%

### 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp721.519.000 atau 82% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran

2024, yaitu sebesar Rp875.690.000. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp65.486.000 atau 8% dari Tahun Anggaran 2023. Penurunan realisasi belanja pegawai ini antara lain disebabkan karena terdapat beberapa rincian belanja pegawai yang langsung diadministrasikan kantor pusat.

Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	754,400,000	681,786,000	90.37	741,478,000	-59.692.000	-8
Belanja Lembur	121,290,000	39,733,000	32.76	45,527,000	-5.794.000	-13
Realisasi Belanja Pegawai Neto	<b>875,690,000</b>	<b>721,519,000</b>	<b>82.39</b>	<b>787,005,000</b>	-65.486.000	-8

## 2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.673.442.309 atau 93% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar Rp6.133.301.000. Realisasi ini mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar Rp59.692.000.

Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 1.5. berikut:

**Tabel 1.5**  
**Realisasi Belanja Barang**  
**yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2021**  
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi		
Belanja Barang Operasional	2,066,821,000	2,097,041,635	93.54	2,010,853,358	86.188.277	4
Belanja Barang Non Operasional	405,240,000	355,338,315	87.69	269,387,578	85.950.737	32
Belanja Persediaan	216,025,000	200,692,944	92.9	236,693,835	(36.000.891)	-15
Belanja Jasa	840,047,000	746,133,041	88.82	791,032,652	(44.899.611)	-6
Belanja Pemeliharaan	1,220,629,000	1,119,489,787	91.71	831,221,629	288.268.158	35

Belanja Perjalanan	1,209,533,000	1,154,746,587	95.47	1,065,203,769	89.542.818	8
<b>Realisasi Belanja Barang Neto</b>	<b>6.133.301.000</b>	<b>5.673.442.309</b>	<b>93</b>	<b>5,204,392,821</b>	469.049.488	9

### 3. Belanja Modal

Tidak ada Belanja Modal Pada Tahun 2024 dengan Rincian Perbandingan dengan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 1.6 berikut:

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Belanja Modal**  
**yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023**  
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	Kenaikan/	%
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Penurunan	
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	69,084,000	(69,084,000)	-100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0	0	0
<b>Realisasi Belanja Modal Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,084,000</b>	<b>(69,084,000)</b>	<b>-100</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Prabumulih Tahun 2024 disusun dalam rangka memberikan gambaran sejauh mana KPP Pratama Prabumulih telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja KPP Pratama Prabumulih Tahun 2024 telah dilaksanakan secara optimal dengan segala upaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, KPP Pratama Prabumulih masih menghadapi beberapa kendala. Untuk itu, Hasil Capaian Kinerja Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Prabumulih, 24 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Andi Mujahid P.

